

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arsyad, Jawade Hafidz, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Hadjon, Philipus M., dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, UGM Press, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K., Septiawan Santana, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- R., Ridwan H., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rosikah, Chatrina D., dan Dessy M. Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirajuddin, dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Titik, Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Volly, Willy D. S., 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. ARTIKEL/JURNAL

Beridiansyah, “Analisis Yuridis terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi”, *Jurnal Integritas*, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2017.

Hendrik, Charren, “Strategi Penguatan Hukum Administrasi Negara Dalam Memberantas Praktik Korupsi Yang Dilakukan Pejabat Administrasi Negara”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Firmansyah, Vicky Zaynul, dan Firdaus Syam, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, *Jurnal Integritas*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Kum, M. Akbar, “Hukum Indonesia Makin Lemah terhadap Koruptor”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5, No. 3, Maret, 2023.

Nirboyo, Ade Juang, “Potensi Korupsi dalam Perizinan Lingkungan melalui Sistem OSS Pasca PP Nomor 5 Tahun 2021”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 2, 2021.

Pane, Musa Darwin, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017.

Putra, M. Amin, “Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Journal Fiat Justitia*, Vol. 9, No. 3, Juli, 2015.

Putra, Nandha Risky, dan Roda Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial”, *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Puspitasari Meliana, Pradana Lukman Randi, “Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan”, *Conference on Economic and Business (CEBI)*, Vol.1, No.1, 2021.

Rianto, Syahrur Adjani, “Disiplin Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Hukum”, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2023.

Solechan, S., “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 3, 2019.

Zamzami, A., “Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 3, No. 2, 2020.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Laurensia Frida Alfiani, 2023, Analisis Yuridis *Multiple Accountability Forums* dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017), Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

D. INTERNET

Dani Prabowo, 2015, KPK Ingatkan Jokowi Soal Janji Kampanye Pemberantasan Korupsi, Kompas.Com, Diakses pada 8 Maret 2024, pukul 10.00 WIB. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/03/24/16255371/KPK.Ingatkan.an.Jokowi.soal.Janji.Kampanye.Pemberantasan.Korupsi>.

Linda Hasibuan, 2019, Menolak Lupa! Mau Dilantik, Ini Janji Kampanye Jokowi-Ma'ruf, CNBC Indonesia, Diakses pada 8 Maret 2024, pukul 10.15 WIB. Diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191020094552-4-108397/menolak-lupa-mau-dilantik-ini-janji-kampanye-jokowi-amin>.

Transparency International Indonesia, 2023, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, The Global Coalition Against Corruption, Diakses pada 8 Maret 2024, pukul 09.00 WIB. Diakses pada <https://www.transparency.org>.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67)